BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kebijakan

Pengertian umum dan istilah kebijakan atau *policy* adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tatanilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda dengan hukum (*Law*) dan peraturan (*Regulation*), kebijakan lebih bersifat adaptif dan intepratatif. Meskipun kebijakan juga mengatur apa yang boleh, dan apa yang tidak bole.

Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diintepretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada. Contoh dari kebijakan itu sendiri berupa Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Keppres, Kepmen, Perda, Keputusan Bupati, dan Keputusan Direktur. Setiap kebijakan yang dicontohkan di sini adalah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh obyek kebijakan.

Pengertian lain menurut Parson, memberikan gagasan tentang kebijakan yaitu:

> "Seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik. Menurutnya kata *policy* mengandung makna kebijakan sebagai *rationale*, sebuah manifestasi dari penilaian pertimbangan yang artinya sebuah

> kebijakan adalah usaha untuk menditinisikan dan menyusun baris rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.” (Parson (2006: 15).

Berdasarkan pengertian di atas kebijakan adaah sebuah manifestasi dari penilaian pertimbangan dan usaha untuk mendifinisikan dan menyusun baris rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.

Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich yang dikutip oleh Wahab bahwa:

> “Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.” (Friedrich dalam Wahab, 2004:3).

Berdasarkan pengertian diatas, bahwa kebijakan itu adalah suatu kebijakan adalah usaha untuk mendifinisikan dan menyusun baris rasional untuk melakukan atau tidak melakukan'suatu tindakandan bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh obyek kebijakan publik. Menurut Anderson dalam Tachjan mengatakan mengenai kebijakan yakni, bahwa:

> “Kebijakan adalah serangkaian kebijakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatika.” (Anderson dalam Tachjan, 2006: 19).

Sesuai dengan penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa kebijakan merupakan sesuatu yang dibuat untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu. Kebijakan dibuat untuk kemudian dilaksanakan oleh pihak pihak tertentu yang berhubungan dengan isi dari kebijakan yang telah dibuat/dirumuskan berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatika.

Said Zainal Abidin, alumni University of Pittsburgh, Pennsylvania, US. Mengatakan Kebij akan merupakan:

> "Kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebij akan dan keputusan keputusan khusus di bawahnya." (Said Zainal Abidin, 2004: 23).

Suatu kebijakan publik mempunyai sifat yang luas dan berada pada strata strategis. Kebijakan publik mempunyai fungsi sebagai pedoman untuk kebijakan atau keputusan keputusan khusus yang berada dibawahnya. Suatu efektivitas kebijakan publik dapat dilihat dari sejauhmana suatu kebijakan yang dibuat telah dapat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, serta dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengacu kepada kebij akan tersebut.

Menurut Inu Kencana Syafie dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Pemerintahan mengutip pendapat Harold Laswell bahwa kebijakan adalah:

> "Tugas intelektual pembuatan keputusan meliputi penjelasan tujuan, penguraian kecenderungan, penganalisaan keadaan, proyeksi pengembangan masa depan dan penelitian, penilaian dan penelitian, serta penilaian dan pemilihan kemungkinan." (Laswell dalam Syafie, 1992: 35).

Kebijakan sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, istilah kebijakan seringkali disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Jika diuraikan terdapat perbedaan antara kebijakan dengan kebijaksanaan. Adapun pengertian kebijaksanaan lebih ditekankan kepada pertimbangan dan kearifan seseorang yang berkaitan dengan dengan aturan-aturan yang ada. Sedangkan kebijakan mencakup seluruh bagian aturan-aturan yang ada termasuk konteks politik, karena pada dasarnya proses pembuatan kebijakan sesungguhnya merupakan suatu proses politik.

Pengertian kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich yang dikutip oleh Wahab bahwa:

> "Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan." (Friedrich dalam Wahab, 2004:3).

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Berkaitan dari sejumlah definisi yangtelah diuraikan diatas, dapat di tarik garis kesimpulan yang dimana sebuah ataupun suatu kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan atau proses dalam mengatasi masalah publik yang didalamnya mengandung konsep atau nilai nilai yang selaras dengan konsep dan nilai yang dianut oleh masyarakat. Kebijakan publik merupakan kegiatan yang diusulkan seseorang yag akhimya dibuat oleh pemmntah dan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, kebijakan ini juga mempunyai bentuk negatif, misalnya kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun, padahal dalam hal tersebut keterlibatan pemerintah sangat diperlukan.

2.1.2 Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi

berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang dimasyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tidakan tertentu.

Pengertian kebijakan public menurut William N Dunn dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik, mengemukakan kebijakan public sebagai berikut:

> "Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung. termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerinta." (Dunn, 1999:132).

Kebijakan Publik yang di kemukakan oleh Dunn bahwa adanya pilihan Pilihan yang saling bergantung satu sama lain, termasuk di dalamnya keputusan keputusan untuk melakukan tindakan. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Suatu kebijakan apabila sudah dibuat maka harus diimplementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia yang dimana sebuah kebijakan di buat oleh pemerintah organisasi yang bersifat mutlak dan harus dilakukan dan mempunyai sangsi jika tidak di lakukan.

Pengertian kebijakan publik menurut Easton, mengemukakan kebijakan publik sebagai berikut:

> "Kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai nilai kepada masyarakat." Easton (1969:3).

Definisi kebijakan publik menurut Easton ini dapat diklasiiikasikan sebagai suatu proses management, yang merupakan fase dari serangkaian kerja pejabat publik. Dalam hal ini hanya pemerintah yang mempunyai andil untuk melakukan tindakan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah publik, sehingga definisi ini juga dapat diklasifikasikan dalam bentuk intervensi pemerintah.

Pengertian kebijakan publik menurut Woll, mengemukakan kebijakan publik sebagai berikut: Kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Adapun pengaruh dari tindakan pemerintah tersebut adalah:

1. Adanya pilihan kebijakan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat.
2. Adanya output kebijakan, dimana kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat.
3. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

(Woll, 1966:6).

Definisi kebijakan publik menurut Woll ini dapat diklasifikasikan sebagai intervensi pemerintah (*intervensi sosio kultural*) yaitu dengan mendayagunakan berbagai instrumen untuk mengatasi persoalan publik. Definisi ini juga dapat diklasifikasikan sebagai serangkaian kerja para pejabat publik untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat.

Pengertian kebijakan publik menurut Chandler dan Plano, mengemukakan kebijakan publik sebagai berikut:

> "Kebijkan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas." Chandler dan Plano (1988:107).

Pengertian kebijakan publik menurut Chandler dan Plano dapat diklasifikasikan kebijakan sebagai intervensi pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah mendayagunakan berbagai instrumen yang dimiliki untuk mengatasi Persoalan publik.

Pengertian kebijakan publik menurut Sulaiman, mengemukakan kebijakan publik sebagai berikut:

> "Kebijakan publik itu adalah sebagai suatu proses yang mengandung berbagai pola aktivitas tertentu dan merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus." Sulaiman (1998:24).

Pengertian kebijakan publik menurut Sulaiman dengan demikian, maka konsep kebijakan publik berhubungan dengan tujuan dengan pola aktivitas pemeiintahan mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan.

Definisi lain mengenai kebijakan pun dikatakan oleh Leo Agustino dalam bukunya Dasar Dasar Keijakan Publik disebutkan karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik, yaitu :

1. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu.
2. Kebijakan publik mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yag terpisah.

3. Kebijakan publkc merupakan apa yang sesungguhnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan. dan lain lain.
4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif.
5. Kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

(Agustino, 2008:8)

Kebijakan publik merupakan kegiatan yang diusulkan seseorang yag akhirnya dibuat oleh pemerintah dan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, kebijakan ini juga mempunyai bentuk negatif, misalnya kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun, padahal dalam hal tersebut keterlibatan pemerintah sangat diperlukan. Sedangkan dalam bentuk positif nya yaitu kebijaka melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dapat menangani suatu permasalahan.

2.1.3 Evaluasi

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran. Evaluasi merupakan tahap akhir dari perumusan kebijakan yang di buat oleh pemerintah. Dengan melakukan evaluasi, maka akan membuahkan pengetahuan yang releva dengan kebijakan, tentang ketidak sesuaian antara kinerja kebijakan yang di harapkan dengan yang dihasilkan. Berikut adalah definisi evaluasi menurut beberapa ahli:

Definisi evaluasi yang dikemukakan oleh Budi Winarno dalam bukunya yang berjudul Teori dan Proses Kebijakan Publik yaitu:

> "Evaluasi dilakukan karena kebijakan publik gagal meraih maksud dan tujuan untuk melihat sebab-sebab kegagalan. Suatu evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang di inginkan. Dalam bahasa yang lebih sempit, evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat suatu kebijakan." (Winarno, 2002: 165).

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diketahui bahwa dengan evaluasi maka akan dapat diketahui apakah suatu kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan telah berhasil atau gagal mencapai tujan awal dibuatnya kebijakan tersebut dan berdampak sesuai dengan apa yang diinginkan. Dengan evaluasi pulamaka akan terlihat seberapa jauh manfaat yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut.

Evaluasi diperlukan untuk mengetahui dampak positif dan negatif atas dikeluarkannya suatu kebijakan, dan evaluasi dilakukan untuk menilai manfaat serta tujuan dibuatnya kebijakan tersebut oleh para pihak yang berkewajiban mengevaluasi kebij akan tersebut.

Sementara itu Suharsimi Arikunto memberikan definisi mengenai pengertian evaluasi, yaitu:

> "Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan." (Suharsimi Arikunto, 2004:1).

Definisi diatas menjelaskan bahwa evaluasi diperlukan untuk menghasilkan suatu informasi yang menyangkut terhadap efektivitas suatu kebijakan yang telah dibuat. Dengan informasi tersebut para pihak yang terlibat dalam proses evaluasi kebijakan tersebut dapat menentukan kebijakan yang akan diambil selanjutnya berdasarkan pertimbangan pertimbangan dan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak.

Pengertian lain evaluasi menurut Darwin adalah:

> "Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan Evaluasi kebijakan pada dasamya adalah suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang ditentukan." (Darwin, 1994:34).

Evaluasi seiring dilakukan, maka akan ditemukan fakta pelaksanaan kebijakan publik dilapangan yang hasilnya bisa positif ataupun negatif. Sebuah evaluasi yang dilakukan secara professional akan menghasilkan temuan yang obyektif yaitu temuan apa adanya; baik data, analisis dan kesimpulannya tidak dimanipulasi yang pada akhirnya akan memberikan manfaat kepada perumus kebikan, pembuat kebijakan dan masyarakat. Dari definisi-devinisi evaluasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, selanjutnya menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektifitas suatu program.

Worthen dan Sanders mengemukakan pendapatnya mengenai evaluasi, mengatakan bahwa:

> "Evaluasi adalah mencari sesuatu yang berharga (worth). Sesuatu yang berharga tersebut dapat berupa informasi tentang suatu program, produksi serta alternatif prosedur tertentu. Karenanya evaluasi bukan merupakan hal baru dalam kehidupan manusia sebab hal tersebut senantiasa mengiringi kehidupan seseorang. Seorang manusia yang telah mengerjakan suatu hal, pasti akan menilai apakah yang dilakukannya tersebut telah sesuai dengan keinginannya semula." (Worthen dan Sanders, 1979: 1).

Evaluasi tidak hanya menyangkut suatu proses, evaluasi merupakan cara untuk mengetahui mengenai sesuatu yang berharga dan merupakan tolak ukur atas hasil dari sesuatu yang telah dilakukan/dibuat. Evaluasi dapat mengukur apakah suatu kebijakan yang telah dibuat telah mencapai tujuan yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan awal dibuatnya kebijakan tersebut. Dengan evaluasi kita dapat membenahi suatu kebijakan agar lebih baik dan bermanfaat bagi para pelaksana kebijakan tersebut, sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif dan eiisien.

Riant Nugroho memberikan definisinya mengenai pengertian evaluasi sebagai berikut:

> "Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungj awabkan kepada konstituennya. Dalam hal ini evaluasi bukanlah hal untuk menyalah nyalahkan melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan sistem pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan public." (Nugroho, 2003:184).

Evaluasi merupakan salah satu aspek yang vital dalam melakukan pengawasan terhadap suatu kebijakan, dengan evaluasi dapat diketahui segala penyimpangan serta kemajuan ataupun hasil dari kegiatan yang telah berjalan.

Dehnisi evaluasi yang dikemukakan oleh Budi Winarno dalam bukunya yang berjudul Teori dan Proses Kebijakan Publik yaitu:

> "Evaluasi dilakukan karena kebijakan publik gagal meraih maksud dan tujuan untuk melihat sebab sebab kegagalan. Suatu evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang di inginkan. Dalam bahasa yang lebih sempit, evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat suatu kebijakan." (Winarno, 20022165).

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diketahui bahwa dengan evaluasi maka akan dapat diketahui apakah suatu kebijakan yang telah _dibuat dan dilaksanakan telah berhasil atau gagal mencapai tujan awal dibuatnya kebijakan tersebut dan berdampak sesuai dengan apa yang diinginkan. Dengan evaluasi pula maka akan terlihat seberapa jauh manfaat yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut.

Sementara itu Suharsimi Arikunto memberikan definisi mengenai pengertian evaluasi, yaitu:

> "Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan infomasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan." (Suharsimi Arikunto, 2004: 1).

Definisi diatas menjelaskan bahwa evaluasi diperlukan untuk menghasilkan suatu informasi yang menyangkut terhadap efektivitas suatu kebijakan yang telah dibuat. Dengan informasi tersebut para pihak yang terlibat dalam proses evaluasi kebijakan tersebut dapat menentukan kebijakan yang akan diambil selanjutnya berdasarkan pertimbangan pertimbangan dan infomasi yang diperoleh dari berbagai pihak.

William N. Dunn dalam bukunya yang beijudul "Pengantar Analisis Kebijakan Publik mendefinisikan bahwa:

> "istilah evaluasi disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*) Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode, metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Jadi, meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluast kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan public." (William N. Dunn 1999:608).

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa memberi minuman yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Evaluasr memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, temasuk pewarnaan masalah dan rekomendasi.

Lebih lanjut, Uzer mengemukan pengertian evaluasi sebagai berikut:

> "Evaluasi adalah suatu proses yang ditempuh seseorang untuk memperoleh informasi yang berguna untuk menentukan mana dari dua hal atau lebih yang merupakan alternatif yang diinginkan, karena penentuan atau keputusan semacam ini tidak diambil secara acak, maka alternatif alternatif itu harus diberi nilai relatif, karenanya pemberian nilai itu harus memerlukan pertimbangan yang rasional berdasarkan informasi untuk proses pengambilan keputusan." (Uzer 2003:120).

Penjelasan diatas yang berkaitan dengan pengertia evaluasi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli, dapat ditarik kesimpulan maupun dapat garis lurus mengenai evaluasi yang dimana evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Evaluasi merupakan proses yang berbelit dan rubit, dikarenakan dimana dalam proses ini melibatkan berbagai macam kepentingan dan berbagain macam

kalangan individu individu yang mempunyai argumen dan pendapat sendiri yang telibat dalam proses evaluasinya.

Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Karenanya, dalam keberhasilan ada dua konsep yang terdapat didalamnya yaitu efektiiitas dan eiisiensi. Pada dasarnya tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan bahan bahan pertimbangan untuk menentukan membuat kebijakan tertentu, yang diawali dengan suatu proses pengumpulan data yang sistematis, selain itu evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, selanjutnya menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektifitas suatu program.

2.1.4 Tujuan dan Fungsi Evaluasi

Setiap kegiatan yang dilaksanakan pasti mempunyai tujuan, demikian juga dengan evaluasi. Menurut Arikunto (2002:213), ada dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-masing komponen. Tujuan dan fungsi evaluasi adalah;

1. Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan.
2. Untuk memberikan obj ektivitas pengamatan terhadap prilaku hasil.
3. Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan.
4. Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan.

(Crawford, 2000:30)

Penjelasan tujuan dan fungsi evaluasi menjeaskan meliputi tujuan tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan kemudian memberikan

objektivitas pengamatan sehingga bisa melakukan mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan dan untuk memberi umpan balik bagi kegiatan yang sedang di jalankan.

Sementara itu menurut Samodra Wibawa, mengatakan evaluasi kebijakan publik memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:

1. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentiiikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
2. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
3. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
4. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sesuai ekonomi dari kebijakan tersebut.

(Wibawa, 1994:10-l l).

Fungsi evaluais kebijakan menurut Wibawa Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya, sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.

Sedangkanmenurut Dunn, ada tiga fungsi evaluasi yaitu:

1. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarisifrkasi dan kritik terhadap nilai nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
3. Evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode metode analisa kebijakan lainya.

(Dunn, 1999:609).

Fungsi evalusai yang mencakup evaluasi dalam meberikan informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan, evaluasi memberi sumbangan pada klarisilikasi dan kritik terhadap nilai nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target dan evaluasipun memberikan manfaat terhadap analisis kebijakan yang lainnya.

Sedangkan evalusi menurut Ernest R. House, dapat dibagi menjadi beberapa model evaluasi:

1. Model sistem, dengan indikator utama adalah efisiensi.
2. Model prilaku, dengan indikator utama adalah keefektidan keterjangkauan kualitas.
3. Model formulasi keputusan, dengan indikator utama adalah keefektifan dan keterjagaan kualitas.
4. Model tujuan bebas (*goal free*), dengan indikator utama adalah pilihan penggunaan dan manfaat sosial.
5. Model kekritisan seni (*art criticism*), dengan indikator utamanya adalah standar yang semangkin baik dan kesadaran yang semangkin baik.
6. Model review profesional, dengan indikator utama adalah penerimaan professional.
7. Model kuasi-legal (*quasi-legal*), dengan indikator utama adalah resolusi.
8. Model studi kasus, dengan indikator utama adalah pemahan atas diversiasi.

(Ernest R. House, 1980:80).

Evaluasi kebijakan menurut Hause (1980:80) memiliki delapan model evalusi dengan memili indikator indikatornya masing masing Model sistem sebagai indikator efisiensi, Model prilaku sebagai indikator produktifitas dan akuntabilitas, Model formulasi keputusan sebagai indikator keefektifan dan keterjagaan kualitas, Model tujuan bebas sebagai indikatornya pilihan penguna dan manfaat sosial, Model kekritisan seni sebagai indikator standar kesadaran yang semangkin baik, Model review profesional sebagai indikatornya penerimaan profesional, Model kuasi-legal sebagai indikatornya resolusi dan yang terakhir Model studi kasus dengan indikator diversitas.

2.1.5 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi adalah salah satu dari kegiantan untuk menilai kebijakan public dari uraian diatas dapat ditarik evaluasi kebijakan publik adalah sebuah prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, selanjutnya menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektifitas suatu program kebijakan publik yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Adapun suatu kebijakan apabila sudah dibuat maka harus diimplementasikan untuk dilaksanakan oleh unit unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia yang dimana sebuah kebijakan di buat oleh pemerintah organisasi yang bersifat mutlak dan harus dilakukan dan mempunyai sangsi jika tidak di lakukan.

Evaluasi kebijakan menurut Patton dan Sawicki, mengemukan empat dimensi pokok dalam evaluasi kebijakan yakni. *Technical feasibility, political viabiliti, economic and jinancial possbility. And administrative operability*. Penjelasan mengenai dimensi evaluasi kebijakan

sebagai berikut:

1. *Technical Feasibility, measure whether policy or program outcome theripurpose. The two principal criteria that fall under this category are efefectiveness and adequacy.*
2. *Economic and Financial Possbility,measure firt what the program cost, and secon what the produce of benefist. Tree concept are prominent to discussion of economic evaluation criteria: tangible versus intangibel:monetarizable versus nonmonetarizable criteria and direct versus indidirect cost-benefit criteria viability.*
3. *Political Viabiliti, policy is developed in politikal test consequwntly must he subjected to political assessment political criteria then. Deal with the to acceptability of alternatives to decision makers, public official, influential citizen and groups and other source of power, law, rules and regulations tha specy hound an acceptable alternatives result form the political proses. Political criteria that should be considered in*

virtually every analysis include acceptability appropriateness, responsiveness, legal and equity.

4. *Administrative Operability, measure how possible it is to actually implement the proposed policy or program within the political, sosial and most importani administration contexs specc criteria to consider in evaluating administrative operability include authority, institutional commitmen capability and organizational support.*

(Patton dan Sawicki, 1986: 156-167)

Dari penjelasan evaluasi kebijakan selayaknya terdiri dari *Technical feasibility, political viabiliti, economic and financial possbility, and administrative Operability* sebagai kerangka acuan atau ukuran yang digunakan Untuk mengkaji pro gram-program kebijakan yang dilaksanakan.

Kelayakan Teknis (*Technical feasibility*), mengukur apakah kebijakan atau hasil dari sebuah program berhasilDua kriteria utama yang termasuk dalam kategori ini adalah efektivitas dan kecukupan.

Kemungkinan Ekonomi dan Keuangan (*Economic and financial possbility*), Pengukuran mencakup pertama biaya program yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kedua, keuntungan yang dihasilkan dan program yang dihasilkan.

Politik Viabilitas (*Political viabiliti*) keterkaitannya politik dalam pembuatan sebuah kebijakan. Ukurannya dalam halini berkaitan dengan didukungnnya kebijakan oleh para pembuat keputusan. Para pejabat publik, masyarakat dan lain lain sumber kekuasaan dalam proses politik. Secara spesipikasi hukum, perundang dan aturan aturan merupakan perwujudan dari padanya.

Administrasi Operability (*Administrative operability*), meliputi mengenai seberapa mungkin program program dilaksanakan sesuai kebijakan yang ada.

Ukuran antaralain adalah otoritas, komitmen institusi kapabilitas staf dan kapalitas iinansial serta dukungan organisasi menyangkut fasilitas fisik dan lain lain dukungan yang memungkinkan terwujudnya pelayanan.

Dengan demikian ukuran yang dimaksudkan menyangkut dukungan para penentukebijakan yang memungkinkan dampak yang ditimbulkan atas kegunaan dan program program kebijakan yang dihasilkan benar benar berguna atau bernilai.

Sedangkan Standar yang dipakai untuk mengevaluasi suatu kebijakan tertentu dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu;

1. *Utility* (manfaat), Hasil evaluasi hendaknya bermanfaat bagi manajemen untuk pengambilan keputusan atas program yang sedang berjalan.
2. *Accuracy* (akurat), Informasi atas hasil evaluasi hendaklah memiliki tingkat ketepatan tinggi.
3. *Feasibility* (layak), Hendaknya proses evaluasi yang dirancang dapat dilaksanakan secara layak.

(Umar, 2002:40).

Berdasarkan uraian di atas dapat di tarik benang merah bahwa setiap teary yang ada mempunyasi kriteria dan standarnya masing masing seperti yang di kemukakan oleh para ahli di atas.

Sedangkan menurut Wollman, terdapat tiga evaluasi kebijakan yaitu *Ex-ante evaluation*, *Ongoing evaluation* dan *Ex-post evaluation*, sebagai berikut:

1. *Ex-ante evaluation*, adalah evaluasi kebijakan dilakukan sebelum kebijakan diimplementasikan secara hipotetik evaluasi tipe ini ditunjukan untuk mengantisipasi dan memberikan penilaian awal tentang perkiraan efek atau dampak serta konsekuensi dari kebijakan yang direncanakan atau telah ditetapkan. Tujuannya adalah memberikan informasi yang relevan dengan kebijakan atau dengan proses pembuatan kebijakan yang sedang berjalan Ex ante evaluation adalah instrumen penting dari penentuan pilihan dari berbagai opsi kebijakan

yang ada. Evaluasi tipeini juga memberikan analisa dampak terhadap lingkungan.

2. *Ongoing evaluation*, mengidentifikasi dan mengukur dampak yang dihasilkan dari program yang sedang berjalan. Esensi dari *Ongoing evaluation* adalah untuk membrikan informasi yang relevan, kembali pada proses implementasi kebijakan saat informasi tersebut dapat dipergunakan untuk memprtbaiki revisi melurukan kembali implementasi kebijakan ke arah yang sesungguhnya ingin dicapaiberkaitan dengan tive evaluasi ini monitoring juga dikategorikan sebagai ongoing evaluation. Monitoring merupakan prosedur evaluasi yang bertujuan untuk secara deskriptif melakukan identifikasi maslahdan memberikan dukungan data yang tepat, yang jika memungkinkan dapat di terapkan. Monitoring juga menyajikan indikator indikator pengukuran dampak atau efek dari kebijakan yang sedang diirnplementasikan.
3. *Ex-post evaluation*, evaluasi ini ditunjukan untuk memberikan penilaian terhadap tingkat pencapaian tujuan serta dampak dan' kebijakan yang telah dilaksanakan.

(Wollman, 2007:393).

Ketiga model atau tive yang dikemukan oleh wolman mengenai evaluasi kebijakan, bahwa evaluasi kebijakan mencakup *Ex-ante evaluation, Ongoing evaluation* dan *Ex-post evaluation* dimana dalam tiga evaluasi dalam kebijakan tersebut memiliki tahapan tahapan tersendiri dalam implementasinya.

Sedangkan Lester dan Sterward, mengkategorikan evaluasi kebijakan menjadi empat tive adapun tive atau model yang dikemukan adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi proses, evalusi yang bekaitan dengan proses implementasi kebijakan.
2. Evaluasi dampak, evalusi yang berkaitan dengan hasi atau pengaruh dari implemntasi kebijakan.
3. Evaluasi kebijakan, evaluasi untuk menguji kesesuaian antara hasi kebijakan dengan tujuan yang ingin dicapai.
4. Meta evaluasi, evaluasi terhatap berbagai implementasi kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan tertentu.

(Lester dan Sterward, 2000:104).

Model atau tive dari evalusi kebijakan menurut Lester dan Sterward mencakup empat tive atau model yaitu evaluasi proses evalausi dampak evalausi kebijakan dan meta evalausi yang dimana dalam tahapnya saling berkaitan dan memilii tahap tahap dalam evaluasi kebijakan.

Evaluasi implementasi kebijakan dibagi tiga menurut timming evaluasi, yaitu sebelum dilaksanakan, pada waktu pelaksanaan dan setelah dilaksanakan. Evaluasi sebelum pelaksanaan yang disebut "Willam Dunn (1999)" sebagai sumber summative. Evaluasi pada waktu pelaksanaan biasanya disebut evaluasi procees.evaluasi setelah kebijakan yang juga disebut evaluasi konsekuensi (*output*) kebijakan dan evaluasi pengaruh (*outcome*) kebijakan. Terlepas dari berbagai permasalahan seputar fungsi evaluasi kebijakan, pada hakekatnya evaluasi kebijakan ini harus dilakukan dalam konteks organisasi yang menyeluruh dengan tujuan dan target yang jelas, prioritas yang jelas serta sumber daya pendukung yang jelas pula untuk mengetahui dan menilai sejauhmana suatu kinerja kebijakan berjalan.

Bessel Negi Tangkilrsan dalam bukunya Balm Kebijakan Publik menjelaskan mengenai pengertian evaluasi kebijakan publik yaitu:

> "Evaluasi kebijakan publik merupakan salah satu dari tahapan prosa kebijakan yang kritis dan penting, karena puasa ini melibatkan bukan hanya evaluator dari kalangan akademisi dan praktisi, namun juga melibatkan komponen masyarakat lainnya, sehingga tercipta kondisi dimana tidak adajarak antara kebijakan publik dengan masyarakat". (Tangkilisan, 2003:7)

Kata evaluasi yang dibicarakan disini adalah evaluasi kebijakan pemerintah, maka kalanga akademis maupun praktisi yang dimaksud diatas adalah pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam menetapkan adanya suatu

kebijakan. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti akan mmguraikan teori yang dipilih untuk dijadikan acuan dalam penelitian laporan Skripsi ini, sesuai judul yang peneliti pilih.

Berikut adalah pengertian evaluasi kebijakan yang diungkap oleh William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul Pengantar Analisis Kebijakan Publik , yaitu, Evaluasi kebijakan pada prinsipnya adalah proses yang dilakukan untuk menilai sebuah kinerja kebijakan yang dihasilkan setelah kebijakan tersebut dibuat dan dilaksanakan, William N. Dunn (2003: 429).

Sesuai dengan pengertian evaluasi kebijakan yang di ungkap oleh William N. Dunn diatas, maka Dunn mengemukakan beberapa hal mengenai kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik, yaitu Efektivitas , Efisiensi, Kecukupan, Penataan, Responsivitas, Ketepatan". (William N. Dunn, 2003: 429).

Pertama, kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan public menurut William N. Dunn, Efektivitas (*effectiveness*):

> "Efektivitas (*effectiveness*), berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dengan diadakannya tindakan. Efektititas atau mencapai tujuan dengan diadakan nya tindakan.Efektiiitas biasanya selalu diukur dengan hal yang berkaitan dengan unit produk atau nilai moneternya" (William N. Dunn, 2003: 429).

Berdasarkan definisi diatas efektifitas adalah suatu alternatif kebijakan untuk mencapai hasil yang diharapkan atau memiliki (akibat). Yang termasuk dalam efektifitas yaitu :

a. Harapan, yaitu hasil yang diinginkan oleh semua pihak dalam suatu kebijakan.

b. Realisasi, yaitu kegiatan nyata dan mempunyai hasil sesuai dengan apa yangdiharapkan dalam mendukung suatu kebijakan.

Adapun pengertian Menurut Effendy mendefinisikan efektivitas sebagai berikut, Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan, (Effendy, 1989:14).

Efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indicator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Kedua, kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan public menurut William N. Dunn, Efisiensi (*eficiency*):

> "Efisiensi (*eficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektifitas dengan usaha yang digunakan Efisiensi biasanya diukur dengan perhitungan sumber daya yang digunakan untuk mencapai efektifitas tertinggi". (William N. Dunn, 2003: 430)

Berdasarkan definisi diatas efisiensi adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Yang termasuk dalam efisiensi yaitu :

a. Sumber Daya, yaitu potensi baik dari potensi manusia atau srana prasana untuk mendukung suatu kebijakan.
b. Optimalisasi, yaitu suatu proses, cara atau perbuatan untuk menjadikan sesuatu paling baik dan paling tinggi.

Adapun pengertian pengertian Efisiensi menurut Malayu S.P Hasibuan yaitu :

> "Perbandingan terbaik antara input (masukan) dan output (hasil), antara keuntungan dengan biaya (antara hasil pelaksanaan dengan sumber yang digunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas". (Malayu S.P Hasibuan, 1994:07)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya untuk memperoleh hasil tertentu dengan menggunakan masukan (input yang serendah-rendahnya) untuk menghasilkan suatu keluaran (output), dan juga merupakan kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar.

Ketiga, kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan public menurut William N. Dunn, Kecukupan (*adequacy*): "Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan masalah." (William N. Dunn, 2003: 430).

Berdasarkan definisi diatas kecakupan adalah seberapa jauh suatu tingkat efektifitas kebijakan yang dibuat aparat pemerintah untuk memuaskan kebutuhan nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan masalah.Yang termasuk kecakupan yaitu kinerja. Kinerja adalah menilai bagaimana seseorang telah bekerja dibandingan dengan target yang telah ditentukan.

Keempat, kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan public menurut William N. Dunn, Perataan (*equity*): "Perataan (*equity*) berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan social serta menunjuk pada distribusi akibat dan

usaha antara kelompok yang berada dalam masyarakat". (William N. Dunn, 2003: 434).

Berdasarkan definisi diatas perataan yaitu berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan social serta menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok yang berada dalam masyarakat. Yang termasuk kedalam keadilan yaitu akuntabilitas public, akuntabilitas publik merupakan ukuran yang menunjukan apakah aktivitas sesorang atau lembaga dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku.

Kelima, kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan public menurut William N. Dunn, Responsivitas (*responsiveness*): "Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan , preferensi atau nilai kelompok kelompok dalam masyarakat tertentu". (William N. Dunn, 2003: 437).

Berdasarkan definisi diatas responsivitas yaitu seberapa jauh kebijakan dapat menyelesaikan masalah. preferensi, atau nilai-nilai yang terkandung . Yang termasuk Responsivitas yaitu:

a. Responsivitas pemerintah.
b. Responsivitas masyarakat.

Keenam, kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan public menurut William N. Dunn, Ketepatan (*appropriateness*). secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantive yang merujuk pada nilai atau harga diri tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan kebijakan tersebut.

Evaluasi merupakan salah satu aspek yang penting dimana dalam melakukan pengawasan terhadap suatu kebijakan pemerintah dengan adanya evaluasi atau mengadakan Evaluasi dapat diketahui apa saja yang mengalami kemunduran dan apa saja yang mengalami kemajuan. Evaluasi berkaitan dengan produksi informasi mengenai nilai,data atau manfaat yang bisa di ambil dari pada hasil kebijakan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dari bebagai macam teori-teori evaluasi kebijakan dari para ahli di atas peneliti mengambil atau mengunakan teory William N. Dunn yang memiliki 6 (enam) indicator dalam bukunya Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua yaitu mengenai kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik, yaitu Efektivitas , Efisiensi, Kecukupan, Penataan, Responsivitasdan Ketepatan.

Peneliti mengunakan teory William N. Dunn karena menurut pandangan peneliti teori tersebut lebih relevan sebagai mana dilihat dari keadaan atau permasalahan yang terjadi di Kota Bandung berkenaan dengan ketertiban angkutan kota menurunkan dan menaikan penumpang bukan pada tempat pemberhentian yang telah di tentukan Khususnya pada Trayek Dago-Abdul Muis (Kebon Kelapa). Tentang definisi evaluasi kebijakan yang sebagai mana harusnya berjalan dengan baik pada sebuah peraturan, namun kenyataan yang terjadi angkutan kota yang masih menurunkan dan menaikan penumpang di sembarang tempat masih sering terjadi sehingga peraturan tersebut tidak berjalan dengan baik

dan diperlukan Evaluasi Kebijakan Penertiban Angkutan Kota di Kota Bandung dengan kriteria-kriteria.

Pertama, Efektivitas dalam kebijakan penertiban angkutan kota di Kota Bandung efektifitas berupa prilaku yang dilakukan oleh Aparatur Dinas Perhubungan dan Kepolisian melalui pelaksanaan penertiban untuk mencapai hasil dan tujuan yang di inginkan oleh para pihak yang menginkan penertiban angkutan kota yakni masyarakat dan pengguna jalan. Efektifitas dapat berupa rasionalitas teknis yang selalu diukur dari unir produk atau layanan dan nilai moneternya yang kemudian dilihat berdasarkan harapan masyarakat serta realisasi kebijakannya.

Kedua, Efisiensi dalam kebijakan penertiban angkutan kota di Kota Bandung efisiensi dilakukan untuk meningkatkan efektivitas melalui pelaksaan penertiban agar kebijakan penertiban angkutan kota di Kota Bandung dapat berjalan dengan efisien dan dapat dinilai berdasarkan optimalisasi, sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sara prasarana yang ada di Kota Bandung, Dinas Perhubungan, dan Kepolisian Kota Bandung.

Ketiga, Kecukupan yang berkenaan dengan seberapa jauh tingkat efektifitas kebijakan penertiban angkutan kota di Kota Bandung dalam pelaksanaan penertiban dapat memuaskan kebutuhan, nilai serta menerapkan pada kebijakan penertiban angkutan kota di Kota Bandung. Sehingga memperolehkan hasil yang diharapkan oleh para pihak yang menginkan penertiban angkutan kota yakni masyarakat dan pengguna jalan, dan dapat dilihat melalui kinerja aparatur

serta kebuasan masyarakat atas adanya pelaksanan penertiban angkutan kota yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005.

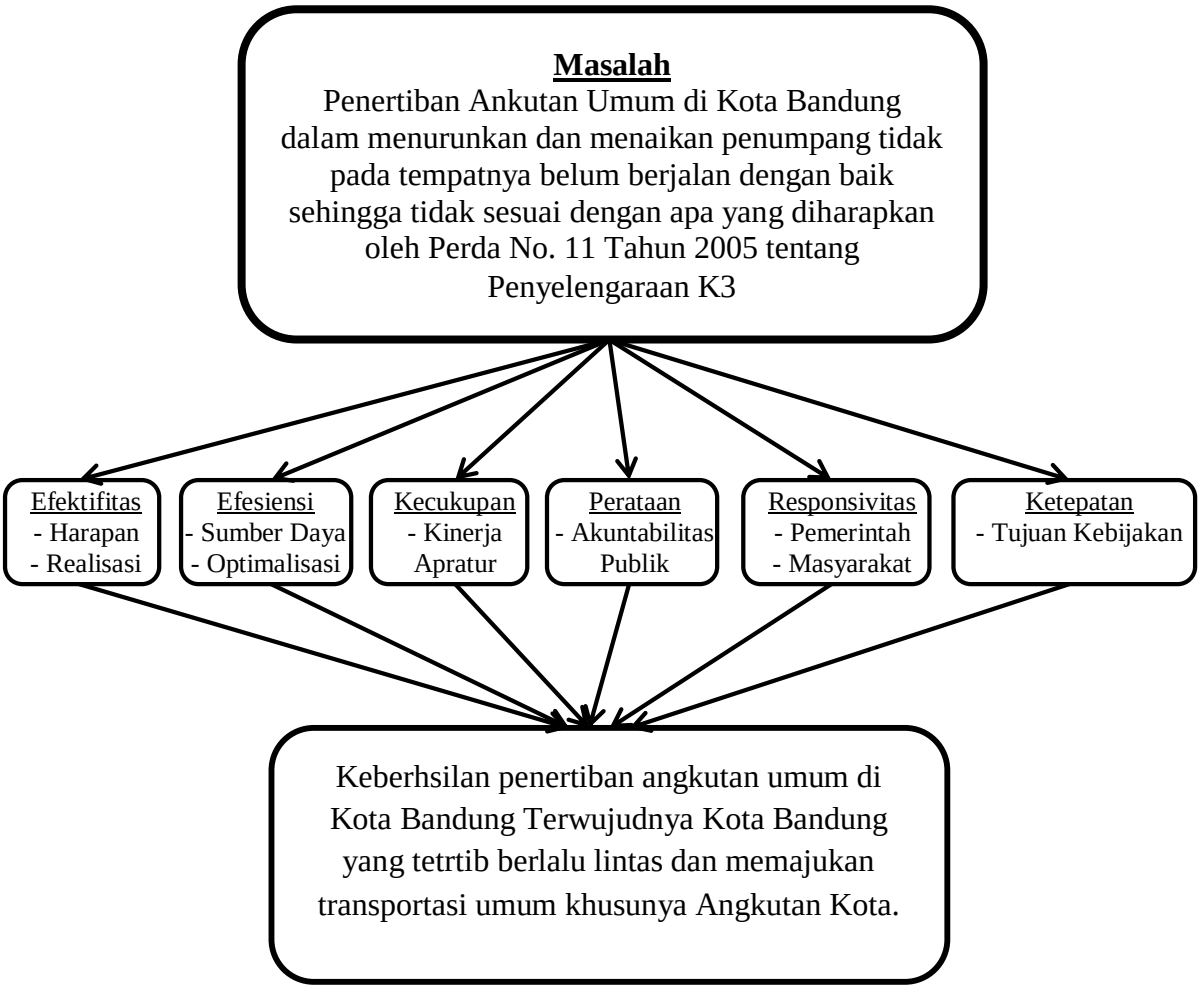
Keempat, Perataan (*equity*). berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan social. Kebijakan yang berorientasi pada perataan merupakan kebijakan yang pada akibatnya atau usahanya secara adil di distribusikan guna menerangkan kepada masyarakat umumnya atau pekerja serta aparatur yang khususnya mengenai ketertiban tata cara naik dan menurunkan penumpang di tempat pemberhentian yang sudah di tetapkan dan dapat dinilai melalui pencapaian sasaran serta transparansi dan akuntabilitas publik atas pelaksanaan kebijakan tersebut.

Kelima, Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan penertiban angkutan kota di Kota Bandung dapat memuaskan kebutuhan para pelaksana kebijakan menertibkan angkutan kota. Responsivitas sangat penting karena dapat mempengaruhi dari keseluruhaan hasil kebijakan. Responsivitas dinilai melalui respon aparatur dan respon masyakakt/pekerja serta pengusaha.

Keenam, Ketepatan kriteria ketepatan secara dekat merujuk pada nilai atau harga dari tujuan dibuatnya kebijan penertiban angkutan kota dan kepata asumsi yang melandasi tujuan dibuatnya kebijakan tersebut sehingga dapat berpengaruh terhadap proses pelaksanan penertiban angkutan kota melalui Dinas Perhubungan dan Kepolisian Kota Bandung yang dapat dilihat dari dampak bagi masyarakat serta dampak bagi aparatur.

Oleh karena itu dalam kebijakan penertiban angkutan kota di Kota Bandung, Evaluasi merupakan salah satu tahapan/proses yang sangat diperlukan, karena berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dapat dinilai melalui hasil akhir dari perumusan kebijakan tersebut. Evaluasi Kebijakan Penertiban Angkutan Kota Di Kota Bandung dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut dapat berpengaruh pada proses penyelesaian permasalahan penertiban angkutan kota di Kota Bandung dan untuk mengetahui kinerja aparatur serta hasil dari dibuatnya kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan yang di analisis dan dideskripsikan dengan menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan publik yang dikemukan oleh William N. Dunn diatas. Berdasarkan uraian diatas peneliti membuat model kerangka pemikiran sebagai berikut;

Gambar 2.1
Model Kerangka Pemikiran
Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan K3 (Terkait Penertiban Turun dan Naik Penumpang Pada Angkutan Umum Jurusan Dago-Abdul Muis Kebon Kelapa)



2.3 Proposisi

Berdasarkan uraian diatas peneliti membuat proposisi sebagai berikut, keberhasilan Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan K3 Terkait Penertiban Turun dan Naik Penumpang Pada Angkutan Umum Jurusan Dago-Abdul Muis Kebon Kelapa dilihat dari kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsibilitas dan ketepatan.